

Research Article

## **Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) Perspektif Fungsi Perencanaan Dalam Meningkatkan Partisipasi Orang Tua Bidang Sarana Dan Prasarana Pada MTs Muslimat NU Kota Palangkaraya**

**Hanafiah<sup>1</sup>, Asmawati<sup>2</sup>, Ajahari<sup>3</sup>, Puspita<sup>4</sup>, Misbah<sup>5</sup>**

1. Universitas Islam Nusantara, hanafiah@uninus.ac.id
2. IAIN Palangkaraya email: asmawati@iain\_palangkaraya.ac.id
3. IAIN Palangkaraya, email: ajahari@iain\_palangkaraya.ac.id
4. IAIN Palangkaraya, Email: puspita@iain\_palangkaraya.ac.id
5. Kementerian Agama Kabupaten Sukamara, email: misbahsayung@gmail.com

Copyright © 2023 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : May 26, 2023

Revised : August 10, 2023

Accepted : August 20, 2023

Available online : September 5, 2023

**How to Cite:** Hanafiah, Asmawati, Ajahari, Puspita, and Misbah. 2023. "Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) Perspektif Fungsi Perencanaan Dalam Meningkatkan Partisipasi Orang Tua Bidang Sarana Dan Prasarana Pada MTs Muslimat NU Kota Palangkaraya". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9 (3):1021-36. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v9i3.587](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i3.587).

**Abstract.** This study aims to describe School-Based Management from the perspective of planning functions for increasing parental participation in facilities and infrastructure at MTs Muslimat NU Palangka Raya. The research approach used is descriptive-qualitative, using the case study method. The subjects of the research were the Head of MTs NU Palangka Raya, the Vice Principal for Curriculum Affairs, the Committee Management, and parents of students. The determination of research subjects was carried out using purposive sampling and data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The stages of data analysis were carried out in four stages, namely data collection, data grouping, data presentation, and conclusion. The results showed that the implementation of Madrasah-Based Management in the planning aspect was carried out through program planning meetings at the beginning of the year, which involved all stakeholders in the Islamic school, such as the head of the Islamic school, deputy head of the Islamic school, treasurer, educators, and education staff, including Islamic school committee administrators and student guardians. The aim is to get input and feedback as well as find solutions if there are problems with the program being prepared. The choice of time is also intended so that parental involvement in program planning can be more optimal. Prior to discussion at the meeting forum, the school prepared a draft planning program, including estimates and sources of the required costs. The program draft was made by the school based

on the SWOT analysis and translated into the RKAS. The involvement of related parties, including parents of students, in meeting activities is intended to grow parents concern and sense of belonging to the school and improve the quality of the school. Involving various parties in planning and managing activities is one manifestation of the implementation of the MBM function. Apart from going through the annual meeting, the school also conducts socialization strategy programs and development programs by utilizing social media such as WhatsApp groups and year-end meetings when distributing student report cards.

**Keywords :** Management; Planning; Participation; Facilities; Infrastructure.

## **PENDAHULUAN**

Di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi membangun kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional telah mencanangkan “gerakan peningkatan mutu pendidikan” pada tanggal 2 Mei 2002. Secara lebih spesifik lagi dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi membangun kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. (UU Sisdiknas, 2003)

Dalam proses implementasi di lapangan, tentu saja dunia pendidikan tidak lepas dari berbagai persoalan yang dihadapi. Salah satu persoalan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa dimaksud adalah persoalan mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan secara nasional di Indonesia bertugas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas nasional terutama yang berkaitan dengan program pendidikan. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan meningkatkan mutu manajemen sekolah dan lain-lain.

Manajemen Berbasis Sekolah atau yang disingkat MBS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan, masyarakat, bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi sehingga diharapkan pendidikan Indonesia berkualitas dan berkelanjutan baik secara makro, meso maupun mikro. (Mulyasa,2002:25). Konsep manajemen pendidikan berbasis sekolah pada dasarnya memberikan kebebasan kepada sekolah untuk melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Penerapan manajemen berbasis sekolah ini tidak hanya sekedar untuk membawa perubahan pada sistem manajemen disekolah tetapi juga berpengaruh terhadap kebijakan serta orientasi pada masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. (Andriani, dkk: 2017). Senada dengan pendapat di atas, menurut Myers dan Stonehill dalam Asbin Pasaribu (2017:12-34) Manajemen Berbasis Sekolah merupakan suatu strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui pengalihan otoritas pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke daerah dan ke masing-masing

sekolah, sehingga kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap proses pendidikan, dan juga mempunyai tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang menyangkut pembiayaan, personal dan kurikulum sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menjadi alternatif dalam meningkatkan mutu pendidikan, karena sudah diterapkan di berbagai negara, Beberapa alasan penerapan MBS adalah: (1) MBS menggunakan prinsip desentralisasi, yaitu penyerahan dan pelimpahan wewenang kepada daerah dan sekolah untuk mengelola pendidikannya secara otonom dalam pengembangan pendidikan secara nasional. (2) Pemberdayaan sumber daya pendidikan termasuk partisipasi dan pemberdayaan orang tua serta masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. (3) Serta adanya dewan komite sekolah yang memantau atau mengorganisir penyediaan fasilitas dan pengawasan dalam pengelolaan pendidikan. (Bugis, dkk, 2018)

MBS memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah yang disertai seperangkat tanggung jawab. MBS ditandai dengan adanya otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. MBS juga menekankan keterlibatan secara maksimal semua pihak seperti pada sekolah-sekolah swasta sehingga menjamin partisipasi staf, orang tua, peserta didik dan masyarakat yang lebih luas dalam perumusan-perumusan keputusan tentang pendidikan. Kesempatan berpartisipasi tersebut dapat meningkatkan komitmen masyarakat secara lebih luas terhadap sekolah yang pada akhirnya akan mendukung efektifitas dalam pencapaian tujuan sekolah, Pengelolaan sekolah menjadi akuntabel, transparan, egaliter dan demokratis serta menghapus monopoli dalam pengelolaan pendidikan. MBS merupakan sebuah pendekatan yang menawarkan keleluasaan pengelolaan oleh pihak sekolah yang memiliki potensi yang besar dalam melahirkan kepala sekolah, guru dan pengelola system pendidikan profesional. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu disertai seperangkat kewajiban serta monitoring dan tuntutan pertanggungjawaban relatif tinggi untuk menjamin bahwa sekolah selalu memiliki otonomi juga memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat sekolah. (Mulyasa, 2002:27) MBS juga ditawarkan sebagai bentuk operasional desentralisasi pendidikan yang memberikan wawasan baru terhadap system pendidikan yang sedang berlangsung selama ini.

Mengingat madrasah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan di Indonesia dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, maka madrasah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas/ mutu pendidikan. Hal ini akan dapat dilaksanakan jika madrasah dengan berbagai keragamannya itu, memiliki otonomi dan diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didiknya. Kesenjangan yang ada harus segera dibenahi dengan menerapkan manajemen pendidikan yang baik dan manajemen pendidikan yang berdasarkan pada manajemen berbasis madrasah sebagai upaya yang tepat untuk mengatasi persoalan mutu pendidikan yang rendah terutama pada lembaga pendidikan Islam saat ini. Hal ini mengingat bahwa manajemen berbasis madrasah merupakan upaya sistematis menyangkut efisiensi

dan efektivitas dalam pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya pendidikan agar menghasilkan mutu pendidikan yang baik dan unggul. Hal ini dilakukan mengingat bahwa kualitas suatu pendidikan sangat dipengaruhi oleh sistem manajemen yang diterapkan. Dalam manajemen pendidikan dikenal dengan dua mekanisme pengaturan, yaitu; sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Pendidikan yang selama ini dikelola secara terpusat (sentralisasi) harus diubah untuk mengikuti irama yang sedang berkembang. Otonomi daerah sebagai kebijakan politik ditingkat makro akan memberi imbas terhadap otonomi madrasah sebagai subsistem pendidikan nasional. Maka sudah sepantasnya pengelolaan pendidikan diserahkan sepenuhnya ditingkat madrasah, untuk mengelola proses pendidikan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan pemberdayaan potensi lokal. Model pengelolaan tersebut dikenal dengan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) atau *School Based Management* (SBM). Pada hakikatnya muncul paradigma baru dalam pendidikan tersebut bertujuan untuk menselaraskan dunia pendidikan dengan kehidupan masyarakat setempat.

Dengan otonomi yang lebih besar, maka sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang tentu saja lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Dalam pandangan Mulyasa, (2002) menyebutkan bahwa MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Menurut Maman Maulana salah satu ukuran keberhasilan MBS adalah peran aktif sekolah, administrator sekolah, guru, orang tua, dan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan di sekolah. Dengan MBS sekolah dapat mengembangkan siswa dan guru sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. (Kurnama dan Depi Prihamdani, 2019:68-73).

Madrasah Tsanawiyah Muslimat NU Kota Palangka Raya adalah salah satu madrasah yang telah menerapkan MBM, terlepas dari segala kendala dan tantangan yang dihadapi Madrasah Tsanawiyah Muslimat NU kota Palangka Raya merupakan salah satu madrasah yang telah menerapkannya MBM, meskipun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan kepala Madrasah Tsanawiyah Muslimat NU kota Palangka Raya (SKS), Ia mengungkapkan bahwa MBM di MTs Muslimat NU Palangka Raya sudah diterapkan sejak tahun 2014. Namun dalam pelaksanaan diawal-awal menjabat tidak lepas dari kendala salah satu diantaranya kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat terutama orang tua dalam berbagai urusan sekolah khususnya yang menyangkut mengenai sarana dan prasarana. Kepala madrasah juga menerangkan bahwa orang tua siswa hanya terpaku pada pembayaran iuran komite tanpa mau terlibat langsung dalam proses perencanaan program anantara lain dalam perencanaan pengembang sarana dan prasarana sekolah.

Dari hasil penelusuran penulis, penelitian tentang manajemen berbasis Sekolah/Madrasah sudah pernah dilakukan antara lain.: 1) Adrianidkk (2017) meneliti tentang *Analisis Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Dalam salah satu keimpulannya disebutkan bahwa Kebijakan diterapkannya manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan

merupakan suatu keniscayaan yang perlu segera dilakukan. Dalam implementasi di lapangan dapat diurutkan sebagai berikut: mensosialisasikan konsep MBS/MBM, melakukan analisis sasaran, mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran, melakukan analisis SWOT, menyusun rencana sekolah/ madrasah, mengimplementasikan rencana sekolah/madrasah dan merumuskan sasaran baru. 2). Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Takdir (2020) meneliti tentang *Analisis Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah Pada Madrasah Aliyah Di Kabupaten Luwu Utara*. Salah satu kesimpulannya menyebutkan kebijakan MBS sudah diimplementasikan di masing-masing madrasah. Namun, efektifitas dalam pengambilan kebijakan oleh kepala madrasah dalam memberdayakan seluruh sumber daya madrasah belum berjalan secara optimal, khususnya di MAN Luwu Utara. Diantara faktornya adalah kurangnya tingkat partisipasi masyarakat, belum berorientasi pada mutu, dan akses transportasi umum bagi siswa ke madrasah (Takdir, 2020:227). 3). Patras, dkk (2019) meneliti tentang *Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah Dan Tantangannya*, Dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa Keberhasilan implementasi MBS memerlukan adanya sosialisasi, keterbukaan, motivasi, dan penyatuan visi. 4). Esty Renaningtiyas, (2017) meneliti tentang *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMPN 1 Madiun*. Hasil temuannya menyebutkan bahwa penerapan MBS SMPN 1 Madiun dilakukan dengan langkah-langkah severals, yaitu: menentukan dari program kerja, sosialisasi, meningkatkan kemitraan atau relasi, menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, peningkatan kapasitas, distribusi otoritas dan *responsibility*, partisipasi masyarakat, keterbukaan dan akuntabilitas, kerjasama, berorientasi pada lulusan dan ketersediaan infrastruktur.

Dari beberapa riset di atas menunjukkan bahwa belum ditemukan penelitian yang berkenaan dengan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) dilihat dalam perspektif perencanaan dan keterlibatan orang tua siswa dalam perencanaan bidang sarana prasarana. Oleh Karena itu penulis tergugah untuk melihat lebih jauh tentang bagaimana manajemen berbasis madrasah dilihat dalam perspektif fungsi perencanaan untuk meningkatkan partisipasi orang tua dalam bidang sarana prasarana di MTs NU Palangka Raya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2017:6), pada pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti mengumpulkan data dan berupaya untuk menyajikan informasi, data berbentuk uraian berdasarkan data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Menurut Bogdan dan Biklen (1998), penelitian kualitatif memiliki karakter antara lain: Pertama, menekankan *setting* alami (natural setting) dan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (key informant). Kedua, penelitian kualitatif lebih menaruh perhatian kepada proses daripada produk (concern with the proces). Ketiga, penelitian kualitatif berusaha mengungkap dunia makna (meaning word) dibalik tindakan sosial seseorang.

Penelitian ini akan berusaha untuk mendapatkan informasi dari subyek atau informan sebagaimana karakteristik penelitian kualitatif, sehingga diharapkan penyajian informasi tidak mengandung bias. Metode penelitian adalah studi kasus

(*Case Study*), penelitian studi kasus merupakan metode yang digunakan untuk mencari atau menyelidiki permasalahan secara mendalam mengenai seorang individu, kelompok, institusi, gerakan sosial, peristiwa, berkaitan dengan fenomena, konteks, dan waktu. Teknik penentuan subyek dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Pengurus Komite dan Orang Tua Siswa. Penentuan Subyek dilakukan secara *purposive sampling* (sampel bertujuan). Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengecekan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik. Tahapan analisa data dilakukan melalui empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan: pengumpulan data, kondensasi data, (kegiatan menggolongkan/mengelompokkan data) dan *display* data (penyajian data) dan penarikan kesimpulan. (Miles, Hubberman, dalam Saldana, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan manusia yang tidak sekedar memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga dapat berpikir secara ilmiah dan filosofis. serta dapat menumbuhkan spiritualitasnya. Pendidikan yang berkualitas diperlukan untuk melahirkan generasi emas. (Didik et al. 2023). Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang Bagaimana Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) dalam perspektif fungsi perencanaan dalam meningkatkan partisipasi orang tua siswa dalam bidang sarana dan prasarana di MTs NU Palangka Raya.

Perencanaan merupakan sebuah dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. (Manulang, 2012:7). Lebih lanjut menurut Manulang bahwa perencanaan yang baik berisikan atau memuat enam unsur, yaitu: *the what, the why, the where, the when, the who, and the how*. Jadi perencanaan yang baik harus memberikan jawaban kepada enam pertanyaan berikut, yaitu: 1) Tindakan apa yang harus dikerjakan? 2) Apa sebabnya tindakan itu harus dikerjakan? 3) Dimanakah tindakan itu harus dilaksanakan? 4) Kapankah tindakan itu harus dilaksanakan? 5) Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu? 6). Bagaimana caranya melakukan tindakan itu? (Manulang, 2012:7)

Berkenaan dengan kegiatan perencanaan tersebut, maka langkah awal dalam kegiatan perencanaan menurut teori manajemen, adalah perumusan tujuan dan program kerja sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari tugas dan fungsi Kepala Sekolah selaku manager termasuk pada MTs Muslimat NU Palangka Raya adalah membuat perencanaan. Berdasarkan data dokumen madrasah penulis menemukan dokumen perencanaan yang dibuat oleh Kepala Madrasah. Dokumen tersebut memuat program kerja yang ingin dicapai selama satu tahun ke depan (Tahun 2023). Dokumen perencanaan tersebut memuat rincian program kegiatan yang akan dilakukan satu tahun ke depan. Hal inilah tentunya menjadi langkah awal bagi tercapai tujuan dan kemajuan madrasah

tersebut. Dalam kenyatannya tak heran jika MTs Muslimat NU Palangka Raya menjadi salah satu sekolah swasta terbaik di kota Palangka Raya.

Dari data dokumentasi diperoleh informasi bahwa Ibu T selaku Kepala Madrasah telah menjabat beberapa periode. Selama menjabat sebagai kepala madrasah ibu T selalu membuat program yang harus tercapai baik yang berkenaan dengan fisik maupun non fisik, Program tersebut berfungsi sebagai pemberi arah dan kontrol bagi pelaksanaan kegiatan sekaligus alat ukur kemajuan madrasah. Berikut petikan wawancara yang disampaikan Ibu T: "Sebagai kepala madrasah pastilah saya membuat sekaligus mempunyai program sekolah sebagai acuan kerja kepala madrasah yang merupakan rencana strategi sekolah untuk satu tahun kedepan, program tersebut berfungsi sebagai media pengembangan atau kontrol bagi kemajuan madrasah, agar madrasah kami tidak tertinggal dari sekolah lain" (15-05-2023).

Senada dengan pernyataan Ibu T, Ibu R selaku wakasek bidang kurikulum juga menegaskan hal yang sama bahwa sebagai Kepala Madrasah Ibu T mempunyai program sekolah yang dijadikan sebagai kontrol dan acuan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah. Dalam konteks ini ibu R menyatakan: "Saya melihat sebagai Kepala Madrasah beliau mempunyai program sekolah yang memuat program jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan semuanya mengarah pada visi misi madrasah yang ada. Program yang dimiliki kepala madrasah tersebut berfungsi sebagai kontrol dan acuan bagi kemajuan madrasah, agar tidak tertinggal dari sekolah lain" (Wawancara, 15-05-2023).

Apa yang diungkap ibu R pada dasarnya memperkuat apa yang diungkap oleh ibu T dimana semua perencanaan dan program sekolah selalu diorintasi pada pencapaian visi dan misi sekolah yakni: "*Terwujudnya Peserta Didik Yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlak Mulia, Berilmu, Beramal dan Berprestasi*" (Dokumen Profil MTs NU, 2022-2023). Kemudian jika ditelusuri dari Misi sekolah, maka MTs NU Palangka Raya memiliki tujuh indikator dan 4 visi salah satu diantaranya adalah meningkatkan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dengan: (Dokumen Profil MTs NU, 2022-2023). Selain itu dalam menyusun program madrasah diperoleh informasi bahwa setiap perencanaan program madrasah yang dibuat mengacu pada analisis kelemahan dan kekuatan sekolah atau yang dikenal dengan analisis SWOT, yang selanjutnya dituangkan dalam RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah). Sebelum ditetapkan sebagai program, draf program yang dibuat tentunya dilakukan kajian-kajian secara rasional, berbasis anggaran dan kebutuhan prioritas. Rencana program tersebut dibuat berdasarkan masukan kotak saran dari berbagai pihak seperti dari yayasan serta memperhatikan usulan dalam rapat dengan wali siswa, komite ataupun *stakeholder* sekolah. Dalam hubungan dengan hal ini ibu T menyatakan: "Program sekolah dibuat dan disepakati dalam rapat yang mengakomodir semua kegiatan madrasah baik kurikulum, kesiswaan dan humas, sarana prasarana didasarkan pada analisis SWOT sekolah, masukan kotak saran dari berbagai pihak, usulan dalam rapat baik rapat wali siswa, *stakeholder* dan selanjutnya dituangkan dalam RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah)" (Wawancara, 06-05-2023).

Lebih Lanjut Ibu T bertutur: "Perencanaan program madrasah berikut RKAS nya disepakati dalam rapat yang kita adakan tiap awal tahun dan diikuti oleh bendahara, wakil kepala madrasah, komite madrasah serta dewan guru, kita gali

keperluan dan kebutuhan madrasah mana yang menjadi prioritas, disusun dan direncanakan sesuai dengan daya /kemampuan madrasah yang ada”. (Wawancara, 06-05-2023).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa dalam konteks penyusunan dan pembahasan rencana program dibicarakan dalam rapat-rapat yang dihadiri oleh pemangku kepentingan dan beberapa hal yang menjadi agenda pembahasan adalah meliputi pemaparan rencana kegiatan, alasan yang mendasari program tersebut di lakukan, rencana biaya dan Sumber pembiayaan, rencana waktu pelaksanaan, sistem pengelolaan dan pengerjaan program Dalam penyusunan program ada dua hal yang menjadi pertimbangan yakni skala prioritas/kebutuhan utama dan kemampuan sekolah dalam hal anggaran. Program madrasah yang tertuang dalam Rencana dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan menjadi acuan pelaksanaan program secara umum berisi nama kegiatan, sumber pembiayaan, jumlah biaya. waktu pelaksanaan serta pelaksana/penanggung jawab kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu T, ia juga menjelaskan bahwa seluruh kegiatan/program pada MTs NU Palangka Raya dilakukan secara swakelola dengan pertimbangan untuk efektifitas dan efisiensi program dan pemberdayaan masyarakat sekitar sekolah termasuk orang tua siswa. Pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sekolah merupakan salah satu implementasi dari misi sekolah dan salah satu ciri dari prinsip MBS untuk sekolah umum dan MBM untuk madrasah (Wawancara 6-5-2023).

Sejalan dengan pernyataan kepala madrasah di atas, Ibu H selaku Bendahara sekolah menegaskan bahwa:”Program sekolah dan juga RKAS disusun bersama-sama dalam rapat awal tahun dengan melibatkan semua unsur sekolah terutama yang berkompeten dan juga ketua komite untuk membahas kegiatan madrasah baik bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana dan humas.” (Wawancara, 17-04-2023). Keikutsertaan pihak komite dalam hal penyusunan program madrasah ini diakui oleh Bapak H, selaku ketua komite MTs Muslimat NU Palangka Raya yang menyatakan bahwa: “Untuk kegiatan madrasah selama ini selalu melibatkan komite, seperti rapat merencanakan pembiayaan, membahas program madrasah baik fisik maupun non fisik, kita membantu memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh madrasah yang menjadi kewenangan kami selaku komite” (Wawancara, 17-04-2023).

Dari ungkapan bapak H di atas, diketahui bahwa peran komite terhadap perencanaan sekolah adalah terlibat dalam perencanaan dan pembahasan serta memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi pihak sekolah. Keterlibatan komite dalam rapat dibuktikan dengan dokumen arsip berupa undangan rapat koordinasi penyusunan program madrasah beserta anggarannya dan daftar hadir rapat yang dimiliki oleh pihak sekolah. (Dokumen Sekolah). Kemudian berdasarkan telaah dokumen, diketahui bahwa rapat penyusunan program dan RKAS dilaksanakan pada awal tahun yaitu bulan Januari atau akhir semester ganjil dengan melibatkan komponen madrasah yang ada. (Observasi 24-04-2023)

Selain berdasar pada analisis SWOT, perencanaan program madrasah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat atau wali siswa di MTs Muslimat NU Palangka Raya perencanaan juga didasarkan pada usulan kotak saran dari berbagai pihak seperti saran pengurus komite, yayasan, para guru dan saran dari orang tua

yang hadir saat rapat. Dalam rapat banyak hal yang dibahas selain perencanaan sarana prasarana dan kegiatan tetapi juga masalah sumbangan komite bagi siswa yang tidak mampu, Ibu T menuturkan: "Dalam rapat banyak hal yang dibicarakan, ada usulan yang terkait dengan program madrasah ada juga tentang saran, penilaian terhadap sekolah, keluhan, macam-macam tapi rata-rata isinya bersifat membangun untuk kebaikan sekolah". (Wawancara, 24-04-2023)

Berdasarkan informasi dari Wakil Kepala sekolah bidang Kurikulum dan Ketua Komite mengenai perencanaan program sekolah di MTs Muslimat NU Palangka Raya dinilai sudah menyesuaikan dengan kebutuhan yang menjadi prioritas dan setiap program yang dilakukan selalu berbasis hasil rapat yang melibatkan banyak pihak termasuk wali siswa. Selanjutnya menurut ibu T pada tahun-tahun awal menjabat sebagai kepala sekolah, kegiatan rapat dalam penentuan program yang melibatkan partisipasi wali siswa dilakukan secara khusus, akan tetapi tingkat kehadiran dan partisipasi wali siswa sangat rendah. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan pembahasan berkenaan dengan partisipasi untuk pembangunan sekolah. Partisipasi dan tingkat kehadiran yang rendah lantaran faktor kesibukan sebagian besar wali murid.

Untuk mensiasati agar wali siswa dapat hadir secara aktif maka strategi di rubah dengan mengagendakan rapat bersamaan waktunya dengan pembagian raport di akhir semester dan atau akhir tahun. Khusus mengenai pembangunan dalam bentuk sarana prasarana madrasah kepala madrasah menjelaskan bahwa perencanaannya dilakukan bersamaan dengan penyusunan program sekolah baik mengenai waktu dan biaya yang digunakan dengan memperhatikan unsur 5W dan 1H yang menjadi cirikhas dari perencanaan, berikut kutipan wawancara dengan kepala madrasah: "Semua kegiatan direncanakan pada awal tahun termasuk perencanaan pembangunan sarana dan prasarana baik itu waktu pelaksanaan maupun biaya yang di gunakan, kami harus benar-benar rinci dalam melakukan perencanaan karena saat ini kami hanya memiliki sumber pendanaan dua sumber pendanaan yaitu dari pemerintah berupa dana BOS dan dari wali siswa berupa dana sumbangan komite yang dikelola oleh komite, terus terang keberadaan dana yang ada belum bisa mengcover semua kegiatan madrasah, sehingga kami harus benar-benar selektif dalam memanfaatkan dana, sehingga dalam menyusun sebuah perencanaan kami selalu memperhatikan unsur 5W dan 1H, agar kegiatan atau sarana dan prasarana yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan madrasah". (Wawancara, 6-5-2023).

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana sekolah juga dilakukan perencanaan dengan memegang prinsip transparansi baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaannya. Dari pernyataan di atas juga dapat diketahui bahwa sumber pendanaan madrasah termasuk sarana prasarana berasal dari dana BOS dan sumbangan wali siswa melalui komite. Mengingat dana sekolah sangat terbatas dan tidak dapat mengcover semua kegiatan, karena itu dalam perencanaan ada skala prioritas. Dalam penyusunan rencana program juga memperhatikan unsur 5W dan 1H. Diksi 5W+1H sendiri diambil dari kata-kata tanya dalam bahas Inggris seperti, *What, Who, When, Why, Where*, dan *How*. Dalam bahasa Indonesia kata-kata tanya tersebut adalah Apa yang mau dilakukan, Siapa yang melakukan, kapan dilakukan, mengapa program tersebut dilakukan (alasan), di mana dilakukan), dan bagaimana melakukannya. Dalam merencanakan program yang memerlukan dana pihak sekolah juga melakukan

secara selektif atau hati-hati karena keterbatasan dana yang dimiliki sekolah. Selain itu juga untuk menjaga kepercayaan publik (orang tua) kepada sekolah karena sebagian besar pembangunan sarana prasarana sekolah merupakan sumbangan dari orang tua. Oleh karena itu dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tersebut, maka pihak sekolah juga berusaha membuat *branding* yang baik dan memberikan informasi/laporan kegiatan sekolah kepada orang tua dan pihak terkait melalui *wathshap group*.

Berikut narasi singkat dari Ibu T: "Kami harus sangat selektif karena keterbatasan dana yang ada kami hanya menggunakan dana yang ada untuk program prioritas saja. tidak semua program sekolah itu masuk dalam RKAS sekolah, semua dilihat dari kebutuhannya, jika program tersebut bisa berjalan tanpa ada anggaran seperti pembinaan personal, atau kegiatan yang memang sudah menjadi tugasnya seperti supervisi yang merupakan tugas kepala sekolah sehingga tidak memerlukan dana lagi. Saya dan semua yang ada di sekolah ini juga berusaha membuat *branding* yang baik terhadap sekolah dengan memberikan info/mensosialisasi berbagai kegiatan dan prestasi para siswa kepada masyarakat melalui media sosial, menciptakan kondisi sekolah yang nyaman serta membuat *baleho* yang dipasang di depan sekolah". (Wawancara, 06-05-2023).

Ibu T saat diwawancara juga menyebutkan bahwa strategi sosialisasi program sarana prasarana selain melalui rapat, pihak sekolah juga melakukan sosialisasi kepada wali siswa melalui media sosial *wathshap group*. Sosialisasi melalui media sosial menurut ibu T, respon wali siswa lebih efektif jika dibandingkan melalui rapat pada umumnya. Kepercayaan wali siswa lebih tinggi terhadap sekolah. Karena informasi perkembangan khususnya sarana dan prasarana sekolah dari waktu ke waktu dapat mereka akses/peroleh. Menurut pengakuan Ibu T, dana pembangunan sarana prasarana yang ada sekarang jika dikalkulasi kurang lebih 40-45 % berasal dari bantuan pemerintah dan 45-60 % berasal dari sumbangan wali siswa. (Wawancara, 6 Mei 2023)

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan manajemen berbasis madrasah dalam upaya meningkatkan partisipasi orang tua siswa bidang sarana dan prasarana di MTs Muslimat NU Kota Palangka Raya sudah berjalan dengan baik. Keterlibatan orang tua siswa atau wali siswa dalam kegiatan perencanaan khususnya sarana prasarana pada dua tahun terakhir cukup baik meskipun tidak semuanya bisa terlibat secara optimal. Kegiatan penyusunan program kegiatan selalu berbasis visi dan misi sekolah dan *renstra*. Pembahasan dan penyepakatan rencana program dilakukan melalui rapat yang melibatkan semua komponen madrasah seperti kepala madrasah, wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum, kesiswaan, humas, bendahara, tenaga pendidikan dan kependidikan serta komite madrasah dan bahkan yayasan. Penyusunan kegiatan didasarkan pada analisis SWOT, memperhatikan skala prioritas serta masukan dari berbagai pihak yang disampaikan dalam rapat yang kemudian dijabarkan dalam bentuk RKAS dengan unsur 5W dan 1H yakni *What*, (Apa yang mau dilakukan) *Who*, (Siapa yang mengerjakan) *When* (kapan kegiatan itu dikerjakan), *Why* (alasan mengapa kegiatan tersebut diprogramkan), *Where* (dimana dilakukan), dan *How* (bagaimana cara melakukannya). Selain melalui rapat sosialisasi program dan pelaksanaan program juga dilakukan melalui media masa seperti *wathshap group*. Sosialisasi melalui WA *group* merupakan hal penting untuk

dilakukan dalam membangun trus (kepercayaan) masyarakat terhadap madrasah. Strategi ini juga dilakukan untuk mengatasi minimnya kehadiran wali siswa pada kegiatan rapat-rapat formal dan agar informasi bisa sampai secara langsung dengan masyarakat, yayasan dan pengurus komite.

Oleh Karena itu jika melihat fakta dan data lapangan mengenai perencanaan program sarana prasarana dapat ditarik kesimpulan sudah berjalan dengan baik, langkah-langkah perencanaan juga mengacu pada prinsip2 fungsi manajemen perencanaan, Kegiatan perencanaan merupakan kegiatan awal dari serangkaian kegiatan yang ada dalam proses MBM. Perencanaan dalam manajemen memegang peranan dan fungsi yang sangat penting untuk menentukan arah organisasi. Apa saja yang akan dilakukan dalam MBM akan menentukan keberhasilan sebuah organisasi dan keberhasilan sebuah MBM akan ditentukan dari penyusunan perencanaan pada sebuah MBM. Oleh karena itu kematangan sebuah perencanaan sangat menentukan keberhasilan sebuah organisasi, hal ini berarti bahwa organisasi harus melakukannya.

Perencanaan merupakan tindakan yang akan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang ditentukan dalam jangka dan ruang waktu tertentu. Dengan demikian, perencanaan itu merupakan suatu proses pemikiran, baik secara garis besar maupun secara mendetail dari suatu kegiatan/pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai kepastian yang paling baik dan ekonomis. Juga dapat dikatakan bahwa perencanaan itu adalah suatu antisipasi dari suatu yang akan terjadi, karena itu harus merupakan proses yang sebaik-baiknya. (Effendy, 1996: 74-75)

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa perencanaan manajemen berbasis madrasah dalam upaya meningkatkan partisipasi orang tua siswa bidang sarana dan prasarana di MTs Muslimat NU Kota Palangka Raya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: *Pertama*, penyusunan draf rancangan program oleh pihak sekolah. *Kedua*, pembahasan perencanaan program sekolah dilaksanakan melalui rapat perencanaan program pada awal tahun dengan melibatkan semua komponen madrasah diantaranya kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kurikulum, kesiswaan, sarpras, humas, bendahara, tenaga pendidikan dan kependidikan serta komite madrasah. *Ketiga*, program dibuat mengacu pada visi, misi dan renstra sekolah, berdasarkan analisis SWOT dan mengakomodir saran dari berbagai pihak baik masyarakat atau wali siswa selanjutnya dijabarkan dalam bentuk RKAS.

Tahapan-tahapan yang telah dilakukan pihak sekolah telah sejalan dengan konsep manajemen berbasis sekolah/madrasah yang menuntut adanya kemandirian sekolah dalam melakukan pengelolaan kegiatan dan pelibatan partisipasi masyarakat dan atau orang tua sejak penyusunan program hingga pelaksanaan program. Manajemen berbasis madrasah sendiri merupakan paradigma baru yang memberikan otonomi luas pada madrasah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi yang diberikan agar madrasah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Keterlibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka memahami, membantu, mengontrol pengelolaan pendidikan". (Depdiknas, 2000:81). Hal ini juga sejalan dengan pendapat Mulyasa yang menyebutkan sedikitnya terdapat tujuh komponen madrasah yang dikelola dengan baik dalam rangka pelaksanaan manajemen berbasis madrasah (MBM) yaitu; (1) kurikulum dan

program pengajaran, (2) tenaga kependidikan, (3) kesiswaan, (4) keuangan, (5) sarana dan prasarana, (6) pengelolaan hubungan madrasah dan masyarakat serta (7) manajemen layanan”.(Mulyasa, 2002: 76).

Apa yang dilakukan pihak sekolah dengan memberikan informasi perkembangan institusi baik pada forum rapat maupun melalui media sosial terhadap pihak-pihak terkait merupakan bagian dari wujud *accountability* (tanggung jawab untuk mengelola sekolah dengan baik dan mempertanggung jawabkannya) baik kepada masyarakat ataupun pemerintah.

Peningkatan mutu sekolah melalui melibatkan/partisipasi orang tua siswa terhadap madrasah, peningkatan profesionalisme guru yang dilakukan oleh kepala madrasah melalui mekanisme melalui rapat bersama antara kepala madrasah bersama guru dan stafnya serta pihak terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memilih serta menetapkan program apa yang akan dijalankan oleh sekolah dalam menunjang mutu pendidikan termasuk mengenai sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soetopo yang menjelaskan bahwa perencanaan penjaminan mutu mempunyai beberapa tahap yaitu: (1) mensosialisasikan konsep program penjaminan mutu kepada seluruh warga sekolah, (2) melakukan analisis sasaran, (3) merumuskan sasaran didasarkan pada visi, misi, dan tujuan sekolah, (4) melakukan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*), (5) menyusun rencana peningkatan mutu, dan (6) merumuskan sasaran mutu baru. (Soetopo, 2009: 45)

Adapun perencanaan untuk menyusun program tersebut diantaranya: (1) mensosialisasikan konsep sarana dan prasarana yang akan dibangun kepada seluruh warga madrasah, kepala madrasah bersama dengan tenaga kependidikan dan seluruh guru bersama-sama untuk membahas program yang akan dilaksanakan, (2) melakukan analisis sasaran, (3) merumuskan sasaran didasarkan pada visi, misi, dan tujuan madrasah, dilakukan kepala madrasah bersama guru dengan membuat konsep pelaksanaan program yang mengacu pada visi, misi, serta tujuan sekolah, beserta pembagian tugas dan tanggungjawabnya kepada masing-masing guru yang ditunjuk sebagai koordinator, (4) melakukan analisis SWOT, (5) menyusun rencana peningkatan mutu, dan (6) merumuskan sasaran mutu, dilakukan oleh Kepala Madrasah beserta staf dan juga seluruh koordinator dengan cara menganalisis segala sesuatu yang berkaitan dengan program yang akan dijalankan oleh sekolah agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara maksimal dan lebih memberikan dampak positif bagi peserta didik khususnya dalam menunjang mutu pendidikan di sekolah baik secara akademik maupun non akademik.

Langkah-langkah yang dilakukan kepala sekolah dalam perencanaan tersebut juga sejalan dengan yang dikemukakan Rusydi Ananda dan Oda Kinata Banurea menyatakan bahwa langkah-langkah dalam perencanaan sarana dan prasarana adalah. menampung semua usulan dari pendidik dan tenaga kependidikan tentang kebutuhan sarana dan prasarana, kemudian menyusun kebutuhan dan rencana pengadaan sarana dan prasarana dalam kurun waktu tertentu misalnya satu semester, satu tahun, atau lima tahun, selanjutnya memadukan rencana kebutuhan dengan sarana dan prasarana yang sudah ada dan memadukan rencana/kebutuhan sarana dan prasarana dengan kemampuan financial untuk pengadaannya selanjutnya membuat

skala prioritas pengadaan sarana dan prasarana serta penetapan rencana. (Ananda dan Oda Kinata Banurea, 2016: 30).

Langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala madrasah tak lepas dari peran dan fungsi kepala madrasah sebagai pimpinan pendidikan, Zulkarnain menjabarkan fungsi kepala madrasah adalah sebagai berikut: (1) membantu guru memahami, memilih, merumuskan tujuan pendidikan. Kepala Madrasah bersama-sama dengan guru dan karyawan bersama-sama merumuskan tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh sekolah secara bersama-sama yang dilakukan pada awal tahun ajaran baru atau awal semester. (2) menggerakkan guru-guru, karyawan, siswa, dan anggota masyarakat untuk menyukseskan program-program pendidikan di sekolah. (3) Menciptakan sekolah sebagai suatu lingkungan kerja yang harmonis, sehat, dinamis, dan nyaman, sehingga segenap anggota sekolah dapat bekerja dengan penuh produktivitas dan memperoleh kepuasan kerja yang tinggi. (Zulkarnain, W, 2013:88).

Beberapa tahapan dalam perencanaan yang dilakukan pihak sekolah menunjukkan salah satu indikator keberhasilan MBM dalam tataran perencanaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Norhalis dalam Kurnia yang menyebutkan ada 8 kriteria jika MBS bisa berhasil yakni: 1) Sekolah dengan MBS memiliki misi atau cita-cita menjalankan sekolah untuk mewakili sekelompok harapan bersama, keyakinan dan nilai-nilai sekolah, membimbing warga sekolah di dalam aktivitas pendidikan dan memberi arah kerja. 2) Aktivitas pendidikan yang dijalankan berdasarkan karakteristik kebutuhan dan situasi sekolah. 3). Terjadinya proses perubahan strategi manajemen yang menyangkut hakikat manusia, organisasi sekolah, gaya pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, penggunaan kekuasaan dan keterampilan-keterampilan manajemen. 4) Adanya keleluasaan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan, guna memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi, baik tenaga kependidikan, keuangan, dan sebagainya. 5) MBS menuntut peran aktif sekolah, administrator sekolah, guru, orang tua, dan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan di sekolah. Dengan MBS sekolah dapat mengembangkan siswa dan guru sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. 6) MBS menekankan hubungan antar manusia yang cenderung terbuka, bekerja sama, semangat tim, dan komitmen yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, iklim organisasi cenderung mengarah ke tipe komitmen sehingga aktivitas sekolah dapat tercapai. 7) Peran administrator sangat penting dalam kerangka MBS, termasuk di dalamnya kualitas yang dimiliki administrator. 8) Dalam MBS, efektivitas sekolah dinilai menurut indikator multitingkat dan multisegi. Penilaian tentang efektivitas sekolah harus memperhatikan multi tingkat, yaitu pada tingkat sekolah, kelompok, dan individu, serta indikator multi segi yaitu input, proses dan output sekolah serta perkembangan akademik siswa. (Kurnama, Depi Prihamdani, 2019:68-73)

Perencanaan pendidikan termasuk di dalamnya mengenai sarana prasarana mempunyai peran penting dan merupakan tahap awal dalam proses manajemen yang dijadikan sebagai panduan pada pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pentingnya fungsi manajemen perencanaan ini diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran pada Surat Al - Hasr [59]; 18) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Kemenag, 2019:799).*

Maksud ayat diatas melalui perencanaan dapat dijelaskan tujuan yang akan dicapai, orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan itu, berbagai sumber daya yang di perlukan, serta Langkah dan metode kerja yang dipilih berdasarkan urgensi dan prioritasnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data yang sudah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Manajemen Berbasis Sekolah pada Aspek Perencanaan. Sudah dilakukan oleh Kepala sekolah MTs NU Palangka Raya secara baik. Mekanisme penyusunan dan penentuan program sekolah yang berkenaan dengan sarana prasarana sudah berjalan dengan baik meskipun masih ditemukan kelemahan seperti masih rendahnya partisipasi wali siswa pada kegoatan rapat formal dalam penentuan dan pembahasan program yang berkenaan dengan sarana prasarana. Proses perencanaan dilakukan dengan penyusunan draf rencana kegiatan oleh pihak sekolah dan diajukan dibahas dalam rapat bersama yang dilakukan pada awal tahun (Januari) diakhir semester ganjil atau awal semester genap tahun berjalan. Rapat melibatkan semua komponen madrasah seperti kepala madrasah, wakil kepala madrasah, bendahara, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta komite madrasah dan wali siswa. Pihak sekolah membuat draf program perencanaan termasuk estimasi biaya yang diperlukan. Draf program dibuat pihak sekolah berdasarkan analisis SWOT, saran dari berbagai pihak baik masyarakat atau orang tua siswa kemudian dijabarkan dalam bentuk RKAS. Dalam rangka meningkatkan keterlibatan/partisipasi wali siswa, pihak sekolah juga melakukan sosialisasi program melalui media sosial seperti wathsahp termasuk melaporkan perkembangan berbagai program kegiatan baik fisik maupun non fisik kepada masyarakat dan wali siswa. Strategi demikian dipandang efektif dalam membangun partisipasi dan trus (kepercayaan) masyarkat terhadap sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Bungin, Burhan, *Analisis data Penelitian Kualitatif*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Barnadib, Imam, *Pendidikan Perbandingan*, Yogyakarta:Andi Offset, 1994.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Depdiknas, *Manajemen Sekolah*, jakarta : Dirjen Dikdasmen, 2000.
- Danim, Sudarwan, *Visi Baru Mana jemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Didik Himmawan, Syaefulloh, Sofyan Sauri, & Azi Khoirurrahman. (2023). Peran tenaga pendidik dalam transformasi pendidikan menuju generasi emas indonesia. *Manajia: Journal of Education and Management*, 1(1), 20–30. Retrieved from <https://manajia.my.id/index.php/i/article/view/3>

- Effendy, Mochtar, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta : Penerbit Bhratara, 1996.
- Fadjar, Malik, *Platform Reformasi Pendidikan Dan Pengembangan SDM*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu. 2001.
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Handoko, T Hani, *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE, 1995,
- Kurnama, Maman Mulia dan Depi Prihamdani, 'Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)', *SJSD: Sekolah dasar*,4.2(2019),68-73
- Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002
- Mulyasa, E., *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mulyasa, E., *Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Startegi dan Implementasi* Bandung: Remaja Rosdakarya, cet.11.,2007.
- Mulyasa, E., *Menjadi Kepala Madrasah Profesional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Milles, Matthew B. dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Tjetjep Rohendi Rohidi (terj.), Jakarta: UI Press, 1992.
- Prastowo, Andi, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: DIVA Preass, 2010.
- Prastowo, Andi,, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012.
- Rozikun, Ahmad dan Namaduddin, *Strategi Perencanaan Manajemen Berbasis Madrasah di Tingkat Menengah* (Jakarta: Listafariska Putra, cet.2, 2008.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Riyanto, Yatim, *Metodologi Penelitian Pendidikan kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya: Unesa Press, 2008.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suprayogo dan Thobroni, *Metodologi, Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutikno, M.Sobry, *Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan yang Unggul; Tinjauan Umum dan Islami*, Lombok: Holistika, 2012.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam penddikan dan Konseling*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Qomar, Mujamil, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Amilda, Dkk, *Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Bercirikan Lingkungan Pada Man 3 Palembang*, 2017, *Jurnal el-Idare*, Vol. 1, No. 2, Desember,112 – 127

- Ayub, Shitseswa Ezekiel, Wanjala Demtila Nafula and Charles Ngome (2014) *IJMRR/* March 2014/ Volume 4/Issue 3/Article No-3/334-343
- Ariana Syafty Bugis, Refian Body, and Toto Andayono, 'Persepsi Guru Terhadap Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Negeri 4 Pariyaman', *Cived: Journal Of Civil Engineering and Vocational Education*, 5.3 (2018), 1-5 (<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/cived/article/view/102489>)
- Asbin Pasaribu, 'Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional Di Madrasah', *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3.1 (2017),12-34)
- Bernays, Edward L., *Manipulating Public Opinion: The Why And The How*, 2003, *American Journal Of Sociology* 33, pages 958-971
- Ervina Jamaluddin, dkk. *Analisis Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan* Jurnal IAIN Bone [file:///C:/Users/HP/Downloads/876-2512-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/876-2512-1-SM%20(1).pdf).
- Esty Renaningtiyas, (2017) meneliti tentang *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMPN 1 Madiun* Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 1, Nomor 1 Januari 2013, 14-17 ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615.
- Mashar, Ali, 'Manajemen Strategi Kepala Madrasah dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan', *Jurnal Isema: Islamic Educational Management*, 4.1, 40-54 (<http://Journal.unisgede.ac.id/indeks.php/isema>)
- Marlina, Leni, *Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pendidikan, Istimbath/* No.15/Th. XIV/Juni/2015/123-139, h. 124
- Mufidah, Nurul. *Peran Manajer Kepala MIN Jejeran Bantul dalam Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Volume 2, Nomor 1, Mei 2017
- Patras, Yuyun Elizabeth, dkk, *Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah Dan Tantangannya*, *Jurnal Manajemen Pendidikan* Vol.7, No.2, Juli 2019 , <file:///C:/Users/HP/Downloads/1329-3329-1-PB.pdf>
- Renaningtiyas, Esty. *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMPN 1 Madiun*, <https://media.neliti.com/media/publications/337955-analisis-implementasi-kebijakan-manajeme-f5a4c6o8.pdf> JURNAL IDAARAH, VOL. IV, NO. 2, DESEMBER 2020
- Unanto, 'Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Pada SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh', *Intelektualita : Kajian Pendidikan, Manajemen, Supervisi Kepemimpinan, Psikologi dan Konseling*, 3.1 (2015), 51-64 <https://jurnal.arrainy.ac.id/index.php/intel/article/view/199>